

**PENGARUH KOMUNIKASI DAN KONDISI SOSIAL – EKONOMI MASYARAKAT
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT ATAS PELAKSANAAN PENGADAAN
LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG – DEMAK DI KELURAHAN
TERBOYO KULON, KOTA SEMARANG**



Aldi Wahyu Mur Riyanto, Dyah Lituhayu, Titik Djumiarti
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024)74605407 Faksimile (024)7465405
Website : <https://fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

Abstrak

Kebutuhan masyarakat terhadap kemudahan mobilitas serta kemajuan ekonomi semakin tinggi. Pemerintah perlu melakukan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Jalur Pantura di Kota Semarang menjadi salah satu jalur perekonomian yang memiliki persoalan dengan Banjir Rob yang dapat menimbulkan kemacetan, kerusakan jalan, serta persoalan kesehatan masyarakat sekitar. Proyek Jalan Tol Semarang – Demak menjadi solusi mengatasi persoalan Jalur Pantura di Kota Semarang serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kelancaran mobilitas. Pengadaan lahan merupakan salah satu tahap dalam pembangunan infrastruktur yang sering mengalami kendala antara pemerintah dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui : (1) pengaruh komunikasi terhadap partisipasi masyarakat; (2) pengaruh kondisi sosial – ekonomi masyarakat terhadap partisipasi masyarakat; dan (3) pengaruh komunikasi dan kondisi sosial – ekonomi masyarakat terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori. Populasi yang digunakan adalah masyarakat yang mengetahui informasi tentang pembangunan jalan tol di Kelurahan Terboyo Kulon. Hasil temuan penelitian menunjukkan adanya kekhawatiran dari masyarakat serta minimnya informasi di masyarakat yang berakibat tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa : (1) pengaruh Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat sebesar 0.166; (2) pengaruh Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat sebesar 0.246; (3) Komunikasi dan Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat secara bersama mempengaruhi Partisipasi Masyarakat sebesar 0.986.

Kata Kunci : Komunikasi, Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah memiliki potensi sebagai kota industri dimana perekonomian di Kota Semarang bergerak atas pemasukan yang berasal dari sektor industri. Salah satu wilayah industri di Kota Semarang terletak pada kawasan pesisir utara Kota Semarang, karena terdapat jalur perekonomian Pantura. Jalur Pantura yang berada pada wilayah pesisir Kota Semarang selain dikenal sebagai jalur perekonomian juga menjadi salah satu titik yang memiliki fenomena alam banjir rob.

Banjir rob merupakan fenomena kenaikan permukaan air laut yang terjadi secara cepat dan mampu untuk memasuki kawasan daratan. Menurut *Marfai dan King*, 2008 dalam Erlani & Nugrahandika, 2019 : 51 banjir rob di Kota Semarang terjadi sebagai akibat dari perubahan alih fungsi lahan di wilayah pantai dengan kemunculan sawah, tambak dan sektor lainnya. Kawasan Pantura di Kota Semarang yang dikenal oleh masyarakat sering mengalami persoalan banjir rob yang mampu menghambat kegiatan perekonomian serta mobilitas warga. Rob yang terjadi pun tidak mengenal musim, sehingga masyarakat yang kurang mengetahui akan mengalami kendala dalam menjalankan aktivitasnya.

Tabel 1. Peringkat Kota Termacet di Indonesia

Peringkat	Kota	Waktu Tempuh (per Tahun)
1.	DKI Jakarta	63 Jam
2.	Bandung	46 Jam
3.	Malang	45 Jam
4.	Yogyakarta	45 Jam
5.	Padang	45 Jam
6.	Medan	42 Jam
7.	Pontianak	40 Jam
8.	Surabaya	37 Jam
9.	Semarang	37 Jam
10.	Denpasar	30 Jam

Sumber : Kompas.com
(<https://bit.ly/3tucgLP>)

Berdasarkan data pada tabel 1 menunjukkan bahwa Kota Semarang termasuk kedalam kota dengan intensitas kemacetan tertinggi di Indonesia. Pemicu atas kemacetan yang terjadi di Kota Semarang antara lain disebabkan oleh tingginya mobilitas masyarakat serta fenomena banjir rob yang terjadi di Kawasan Industri Kaligawe. Sehingga, dengan adanya persoalan yang terjadi di Kota Semarang pemerintah dituntut untuk memberikan solusi dengan dibangunnya Jalan Tol Semarang – Demak.

Proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak merupakan proyek kerjasama antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa pembangunan jalan penghubung yang menghubungkan Kawasan Kaligawe hingga berujung pada wilayah Sayung, Kabupaten Demak. Berdasarkan perencanaan proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak akan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai pemecah kemacetan yang sering terjadi di Jalur Pantura dan juga akan mengatasi persoalan banjir rob.



Gambar 1. Rancangan Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak

Sumber : BPN Kabupaten Demak, 2021

Pembebasan lahan merupakan langkah awal dalam setiap pelaksanaan sebuah proyek pembangunan. Proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak ini berlandaskan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/52 tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah yang menerangkan bahwa lokasi yang akan

digunakan dalam pengadaan lahan terbagi kedalam 2 seksi utama, salah satu wilayah yang terkena dampak pengadaan lahan adalah Kelurahan Terboyo Kulon, Kota Semarang. Kelurahan Terboyo Kulon merupakan wilayah yang memiliki letak geografis berada pada wilayah pesisir utara Kota Semarang. Kelurahan Terboyo Kulon secara administratif merupakan wilayah yang terdiri dari 2 RW dan 6 RT dan memiliki kondisi wilayah yang dibangun berbatasan langsung dengan wilayah perairan laut dan tambak. Masyarakat di Kelurahan Terboyo Kulon merupakan populasi masyarakat pesisir, dimana kultur sosial masyarakat masih bersifat masyarakat pedesaan dan memiliki kebiasaan untuk mengadakan musyawarah ketika terdapat rencana pembangunan ataupun kegiatan kemasyarakatan. Sedangkan, untuk kondisi ekonomi dimana masyarakat Kelurahan Terboyo Kulon masih bergantung pada potensi perairan, seperti nelayan, pekerja tambak dan lainnya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan ditemukan terdapat beberapa hal yang menjadi kendala atas pelaksanaan pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak pada seksi 1 yang berada pada wilayah Kota Semarang. Permasalahan pertama adalah adanya ketidakjelasan informasi atas rencana

pelaksanaan pengadaan lahan yang disebabkan masih adanya regulasi yang tumpang tindih mengenai hak atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar - Dasar Pokok Agraria pada pasal 27 yang menyatakan bahwa status kepemilikan tanah oleh warga negara akan hilang apabila tanah tersebut tergolong dalam tanah yang musnah yang salah satu pemicunya adalah adanya proses abrasi. Namun, bila melihat pada Peraturan Presiden No. 56 tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional dalam Pasal 4 telah dijelaskan bahwa warga negara atau masyarakat yang terdampak pengadaan lahan dalam pembangunan strategis nasional berhak memperoleh ganti rugi apabila telah menggunakan tanah tersebut dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun.

Permasalahan lain yang timbul adalah kurangnya komunikasi antara pihak pelaksana proyek dengan masyarakat selaku pihak yang memiliki lahan. Akibat yang dapat timbul adalah memunculkan keraguan dari masyarakat yang memiliki kuasa atas tanah untuk menyerahkan tanah yang dimiliki untuk pembangunan infrastruktur. dengan adanya keraguan dari

masyarakat menimbulkan sikap penolakan dari beberapa masyarakat. Masyarakat memiliki ketakutan apabila tanah yang mereka miliki tidak memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi yang disebabkan status kepemilikan tanah yang tidak memiliki keterikatan hukum. Selain itu, masyarakat memiliki ketakutan terhadap perubahan kondisi di lingkungan sekitarnya apabila pengadaan lahan tetap dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengamati hubungan antara Komunikasi dan Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat dengan Partisipasi Masyarakat atas rencana pelaksanaan pengadaan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kota Semarang. Hal tersebut sesuai dengan teori pembangunan partisipatif dari Abady, 2013 yang menerangkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Komunikasi, Tingkat Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat, dan Komitmen Pemerintah.

Berdasarkan topik tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, antara lain :

1. Apakah terdapat pengaruh Komunikasi terhadap Partisipasi

Masyarakat atas rencana pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak?

2. Apakah terdapat pengaruh Kondisi Sosial Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat atas rencana pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak?
3. Apakah terdapat pengaruh Komunikasi dan Kondisi Sosial Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat atas rencana pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori karena peneliti ingin menguji hipotesis yang telah terbentuk serta untuk menjelaskan hubungan antara variabel Komunikasi (X1) dan Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y). Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah masyarakat di Kelurahan Terboyo Kulon, Kota Semarang yang mengetahui informasi rencana pengadaan lahan dengan menggunakan sampel sebanyak 86 responden yang diambil dengan teknik *Non-Probability Sampling* dengan Sistem Kuota. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Uji *Rank Kendall-Tau b* dan Uji *Kendall-Tau W*.

KAJIAN PUSTAKA

Partisipasi Masyarakat

Menurut Bordy (1974) dalam Mardikanto, 2012 : 81 - 82 menerangkan bahwa partisipasi merupakan tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Menurut Conyers (1991 : 154-155) dalam Abady, 2013 menerangkan bahwa partisipasi masyarakat dikatakan penting dalam konsep pembangunan partisipatif, dimana partisipasi masyarakat dapat menjadi sumber informasi mengenai kondisi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat; kemudian partisipasi masyarakat mampu memudahkan pencapaian efektifitas dan efisiensi dari proyek pembangunan; dan partisipasi merupakan hak demokrasi bagi rakyat.

Sastropetro, 1986 : 41 menerangkan bahwa terdapat beberapa unsur penting dalam menentukan partisipasi masyarakat, antara lain :

- 1) Komunikasi yang dapat menimbulkan pengertian yang efektif;
- 2) Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku sebagai bentuk penumbuhan kesadaran masyarakat
- 3) Kesadaran masyarakat berdasarkan hasil perhitungan dan pertimbangan;

- 4) Antusiasme yang mampu menumbuhkan sikap spontanitas masyarakat melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari pihak luar; dan
- 5) Tumbuhnya rasa tanggung jawab masyarakat sebagai upaya dari kepentingan bersama sesuai dengan kedudukannya.

Yadav (UNAPDI, 1980) dalam Mardikanto, 2012 : 82-84 juga menerangkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diamat pada beberapa tahap, yaitu (1) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat tumbuh apabila pemerintah membuat suatu forum yang diadakan secara terbuka kepada masyarakat; (2) Partisipasi dalam proses pelaksanaan kegiatan, dimana partisipasi ini merupakan suatu pemahaman tentang pemerataan pembagian sumber daya yang berasal dari masyarakat dan dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan; (3) Partisipasi dalam proses pemantauan dan evaluasi pembangunan, yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menghimpun data dan informasi terkait perkembangan kegiatan atau program pembangunan serta perilaku aparat pemerintah pada saat pelaksanaan program yang sedang berlangsung; (4) Partisipasi dalam proses pemanfaatan hasil pembangunan, yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah mampu untuk

memanfaatkan peluang dari pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diberikan.

Komunikasi

Menurut *Gode* dalam Saputra 2013 : 17 menerangkan komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula yang dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki dua orang atau lebih. Pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas dari adanya pola hubungan yang harus terjalin secara menyeluruh dan berkelanjutan sejak awal program direncanakan hingga program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Peran komunikasi menjadi penting karena dalam pelaksanaan suatu program pihak pelaksana (pemerintah) membutuhkan informasi dari berbagai pihak (masyarakat maupun swasta) agar seluruh pihak yang terlibat dapat mengetahui maksud, tujuan serta dampak yang akan mereka dapatkan dari program tersebut. Sastropoetro, 1986 : 41 menerangkan bahwa terdapat beberapa unsur penting dalam menentuka partisipasi masyarakat, salah satunya adalah komunikasi dimana apabila intensitas komunikasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah tinggi, maka mampu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas pembangunan yang akan berjalan.

Edwards III menerangkan suatu pola komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan memiliki 3 dimensi, antara lain : (1) Dimensi transmisi menghendaki suatu program atau kegiatan bukan hanya disampaikan pada pelaksana (implementor) kebijakan, namun perlu disampaikan juga pada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung; (2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menerangkan bahwa kebijakan perlu disampaikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas, agar mereka dapat mengetahui maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari program atau kegiatan tersebut sehingga masing-masing dapat mempersiapkan keperluan serta penyusunan rencana dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien; (3) Dimensi konsistensi (*consistency*) yang dibutuhkan agar suatu kebijakan tidak terjadi simpang siur yang dapat membingungkan para pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan (Winarno, 2011 : 179 - 181).

Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat

Pelaksanaan sebuah kebijakan publik, tentu terdapat beberapa hal yang terlibat baik sebelum, saat ataupun sesudah pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan suatu

kebijakan juga akan bersinggungan dengan berbagai macam hal yang menyangkut pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut, salah satunya adalah kondisi sosial masyarakat. M. Sastropraja (2000) menjelaskan Kondisi Sosial – Ekonomi merupakan keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat sekelilingnya (Basrowi dan Siti Juariyah, 2010 : 60). *Mazmanian* dan *Sabatier* menerangkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan atas pelaksanaan kebijakan, salah satunya kondisi sosial – ekonomi masyarakat. Pandangan dari *Mazmanian* dan *Sabatier* terhadap suatu implementasi kebijakan tidak hanya memandang kepatuhan serta perilaku dari setiap aktor yang terlibat, melainkan juga memandang adanya hubungan secara politik, ekonomi dan sosial yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pengaruh pihak yang terlibat (Wahab, 2015 : 135).

Slamet; 1994 : 97, 137 dalam Manggala & Mustam, 2015 : 6 - 7 yang menerangkan bahwa faktor sosial – ekonomi yang berasal dari dalam kelompok masyarakat diukur melalui beberapa indikator, seperti : Jenis kelamin; Usia; Pendidikan; Pekerjaan; Lamanya tinggal; Orbitasi/Jarak; dan Sentralitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

1. Pengaruh Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis antara Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat

			Komunikasi	Partisipasi Masyarakat
Kendall-Tau b	Komunikasi	Korelasi	1.000	0.166
		Sig.	-	0.032
		Total	86	86
	Partisipasi Masyarakat	Korelasi	0.166	1.000
		Sig.	0.032	-
		Total	86	86

Sumber : Olah Data Primer, 2021

Edwards III menerangkan bahwa komunikasi dalam implementasi memiliki 3 dimensi, antara lain : (1) Dimensi transmisi/ perpindahan informasi; (2) Dimensi kejelasan informasi; dan (3) Dimensi konsistensi informasi (Winarno, 2011 : 179 - 181). Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk mengamati pengaruh Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat Kelurahan Terboyo Kulon atas pelaksanaan pengadaan lahan.

Berdasarkan hasil perhitungan dan data pada tabel 2 dapat diketahui bahwa hubungan antara variabel Komunikasi (X1)

terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) adalah hubungan yang Positif dan Signifikan. Hal tersebut diketahui pada nilai perhitungan koefisien korelasi (R hitung) sebesar 0.166, serta hasil perhitungan taraf signifikansi yang didapatkan sebesar 0.032 yang mana hasil tersebut lebih kecil dari taraf signifikans yang digunakan = 0.05 ($0.032 < 0.05$).

Sesuai dengan pendapat dari Santoso Sastropetro (1986) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dipengaruhi oleh berbagai unsur, salah satunya adalah perlu adanya komunikasi yang efektif. Berdasarkan temuan dan hasil perhitungan menunjukkan bahwa memang benar adanya bahwa Komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan lahan. Temuan yang diperoleh penulis bahwa sejauh ini masyarakat di wilayah Kelurahan Terboyo Kulon belum mengetahui secara rinci tentang program pembangunan jalan tol tersebut. Rendahnya komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah dibuktikan dengan masih minimnya kegiatan pengarahannya serta sosialisasi mengenai proyek pembangunan jalan tol serta proses pengadaan lahan yang disebabkan karena kondisi lingkungan yang saat ini belum sepenuhnya kondusif dari adanya pandemi *Covid-19*.

2. Pengaruh Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat

Slamet; 1994 : 97, 137 menerangkan bahwa kondisi sosial – ekonomi masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator yang diambil dalam penelitian ini, yaitu (1) Pendidikan, (2) Pekerjaan; (3) Pendapatan; dan (4) Lama Tinggal masyarakat yang dapat menunjukkan pengaruh dari Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat atas rencana pengadaan lahan di Kelurahan Terboyo Kulon.

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis antara Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat

			Kondi si Sosial Ekono mi	Partisi pasi Masya rakat
Kendall-Tau b	Kondi si Sosial- Ekono mi	Korelasi	1.000	0,246
		Sig.	-	0,002
		Total	86	86
	Partisi pasi Masya rakat	Korelasi	0,246	1.000
		Sig.	0,002	-
		Total	86	86

Sumber : Olah Data Primer, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan dan data pada tabel 3 dapat diketahui bahwa hubungan antara variabel Kondisi Sosial –

Ekonomi Masyarakat (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) adalah hubungan yang Positif dan Signifikan. Hal tersebut diketahui nilai perhitungan koefisien korelasi (R hitung) sebesar 0.246, serta hasil perhitungan taraf signifikansi yang didapatkan sebesar 0.002 yang mana hasil tersebut lebih kecil dari taraf signifikans yang digunakan = 0.05 ($0.002 < 0.05$).

Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan rencana pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak. Hal tersebut juga didukung dengan kondisi masyarakat Kelurahan Terboyo Kulon merupakan masyarakat yang memiliki kondisi yang baik dan terbuka. Berdasarkan analisa dari setiap responden yang terdiri dari beberapa lapisan, seperti Tokoh Masyarakat, Pedagang dan Pengusaha, Pekerja Tambak dan Ibu Rumah Tangga merupakan kelompok masyarakat yang telah bermukim dan memanfaatkan lahan lebih dari 10 tahun. Kemudian, mayoritas masyarakat yang ada di Kelurahan Terboyo telah mengenyam bangku pendidikan formal, walau tidak secara menyeluruh. Serta tingkat ekonomi masyarakat Kelurahan Terboyo Kulon merupakan kelompok masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil tambak dan juga pekerja buruh

industri memiliki pendapatan yang mayoritas dibawah standar upah minimum.

3. Pengaruh Komunikasi dan Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat bersama-sama terhadap Partisipasi Masyarakat

Sastropoetro, 1986 menerangkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti Komunikasi dan Tingkat Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil seperti dalam tabel 4 berikut

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis antara Komunikasi dan Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat

Total Sampel (N)	86
Rank Kendall's W	0,986
Chi Square	169.,545
df	2
Signifikansi Asumsi	0.000

Sumber : Olah Data Primer, 2021

Berdasarkan data pada tabel 4 didapatkan hasil bahwa variabel Komunikasi (X1) dan variabel Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat (X2) memberikan pengaruh pada variabel Partisipasi Masyarakat (Y) sebesar 0.986. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan skala *Kendall-Tau* diketahui

bahwa suatu hipotesis memiliki hubungan yang kuat jika hasil perhitungan $> 0.60 - 0.799$. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel Komunikasi (X1) dan variabel Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y). Taraf signifikansi yang didapatkan sebesar 0.000 yang mana berdasarkan taraf signifikansi yang digunakan $= 0.05$ hasil yang didapatkan lebih rendah dari skala taraf signifikan yang digunakan ($0.000 < 0,05$). Sehingga, dapat diketahui bahwa hubungan antara variabel Komunikasi (X1) dan variabel Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) terdapat hubungan yang signifikan.

Hasil penelitian dapat diketahui Komunikasi dan Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat memberikan kontribusi atas Partisipasi Masyarakat untuk mencapai keberhasilan sebuah pelaksanaan kebijakan ataupun kegiatan yang melibatkan masyarakat umum. Hal tersebut sesuai dengan teori yang diangkat dalam penelitian ini, yang mana pola hubungan yang terjadi diantara ketiga variabel tersebut adalah apabila pemerintah selaku pihak pelaksana program yang memiliki harapan program tersebut dapat berjalan dengan lancar perlu mengedepankan berbagai faktor, antara lain adalah

Komunikasi dan Kondisi Sosial – Ekonomi masyarakat itu sendiri.

KESIMPULAN

1. Pengaruh Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat diperoleh hasil korelasi sebesar 0,166. Kemudian, hasil taraf sigifikansi yang diperoleh sebesar 0,032 yang mana hasil tersebut lebih kecil dari standar signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 ($0,032 < 0,05$).
2. Pengaruh Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat diperoleh hasil korelasi sebesar 0,246. Kemudian, hasil taraf sigifikansi yang diperoleh sebesar 0,002 yang mana hasil tersebut lebih kecil dari standar signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 ($0,002 < 0,05$).
3. Komunikasi dan Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat bersama-sama mempengaruhi Partisipasi Masyarakat diperoleh hasil korelasi sebesar 0,986 dan hasil taraf sinifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut memiliki makna dimana Komunikasi dan Kondisi Sosial – Ekonomi Masyarakat memberikan pengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat atas rencana pelaksanaan pengadaan lahan yang akan terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abady, A. P. (2013). PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN DAERAH. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3, 25–34.
<https://doi.org/10.1007/BF02002689>
- Basrowi dan Siti Juariyah. (2010). ANALISIS KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA SRIGADING, KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 7(April), 58–81.
- Erlani, R., & Nugrahandika, W. H. (2019). Ketangguhan Kota Semarang dalam Menghadapi Bencana Banjir Pasang Air Laut (Rob). *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 3(1), 47.
<https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.1.47-63>
- Manggala, Y., & Mustam, M. (2015). *Pada Pembangunan Desa Wisata Genting Kabupaten*. 1–13.
- Mardikanto, T. dan P. S. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Saputra, M. I. (2013). Pola Komunikasi Islam Penyuluh Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Kota Langsa. *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, 17–54.
[http://repository.uinsu.ac.id/1109/5/Bab II.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/1109/5/Bab%20II.pdf)
- Sastropoetro, R. A. S. (1986). *Partisipasi, Komunikasi, Persepsi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Penerbit Alumni.

- Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 17(1), 7–15.
<https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/290>
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik* (F. Hutari (ed.); 1st ed.). Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2011). *Kebijakan Publik*. CAPS.